

EFEKTIVITAS KINERJA BPBD DALAM PENANGGULANGAN ABRASI DI PESISIR PANTAI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD PROVINSI SULAWESI UTARA

Fransiskus Juniver Matei

NPP. 29.1502

*Asdaf Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email : junivermatei33@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the ineffective performance of BPBD in Talaud Islands Regency in tackling disasters, especially abrasion that occurred on the coast of Talaud Islands Regency. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the effectiveness of BPBD performance in overcoming abrasion on the coast of the Talaud Islands Regency, North Sulawesi Province. **Method:** This study uses qualitative methods and qualitative data analysis on the effectiveness of performance according to Robbins's (2006) theory. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that community participation in assisting the abrasion prevention process is good, the implementation is classified as running smoothly, although it is still constrained by climatic conditions, limited access to locations, inadequate facilities and infrastructure, and the level of awareness of some people is still low. **Conclusion:** The effectiveness of the BPBD of the Talaud Islands Regency is running quite effectively, this can be seen from the implementation of abrasion prevention programs such as the establishment of a communication network from BPBD with the Sub-District/Kelurahan/Village as well as with the community as well as strategies by utilizing potential resources that are not destructive, but preserve the coastal ecosystem itself. In order to increase the effectiveness of BPBD's performance in tackling abrasion, it is recommended to renew its facilities and infrastructure, both in terms of infrastructure and personnel, and always enforce the principles of disaster management.

Keywords : Performance Effectiveness, Disaster Management Agency (BPBD), Disaster Management, Abrasion

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan belum efektifnya kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam menanggulangi bencana khususnya abrasi yang terjadi di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kinerja BPBD dalam penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis data kualitatif terhadap efektivitas kinerja menurut Teori Robbins(2006). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat dalam membantu proses penanggulangan abrasi baik, pada pelaksanaan tergolong berjalan lancar, meskipun masih

terkendala dengan kondisi iklim, terbatasnya akses menuju lokasi, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta tingkat kesadaran beberapa masyarakat yang masih rendah. **Kesimpulan:** Efektivitas kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud berjalan cukup efektif, hal ini dilihat dari terlaksananya program-program penanggulangan abrasi seperti pembentukan jaringan komunikasi dari BPBD dengan pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa maupun dengan masyarakatnya dan juga strategi dengan memanfaatkan potensi sumber daya seadanya yang tidak merusak, melainkan melestarikannya ekosistem pantai itu sendiri. Guna meningkatkan efektivitas kinerja BPBD dalam menanggulangi abrasi, disarankan untuk memperbaharui sarana dan prasarananya baik dari infrastruksur maupun personel, serta selalu menegakkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana.

Kata Kunci : Efektivitas Kinerja, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), Penanggulangan Bencana, Abrasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja adalah hasil dari menyelesaikan tugas. Kinerja dalam bahasa Inggris disebut “*job performance* atau *actual performance* atau *performance level*”, yaitu seberapa sukses seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini mengacu pada pemerintah, yang beroperasi sebagai organisasi yang bertugas mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan pedoman untuk pencapaian tujuan nasional. Pemerintah dilahirkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ketertiban umum, dan untuk memungkinkan semua orang melakukan kegiatan mereka dengan langkah mereka sendiri. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pemerintah tentunya mempunyai fungsi pelayanan, pengaturan, pembinaan, kewenangan, dan perlindungan. Adanya fungsi ini menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

Selain sumber daya dan daya dukung lingkungan, melaksanakan tugas yang sulit ini membutuhkan kelembagaan yang berkualitas, didukung oleh nilai-nilai dan peraturan yang berlaku bagi lembaga, masyarakat, dan pemerintah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan kewajiban di bidang kebencanaan. Tujuan dibentuknya lembaga ini antara lain untuk mengurangi risiko akibat bencana.

Menurut Supriyadi (2017), pantai merupakan titik pertemuan darat dan laut, dan keadaannya berubah dari waktu ke waktu karena adanya pasang surut air laut. Perubahan pesisir dapat berupa hilangnya lahan (*wear*) atau perolehan lahan (*akresi*). Dari penelitian Diposaptono (2011), faktor alam merupakan salah satu proses abrasi, seperti cuaca atau iklim akibat aktivitas manusia, yang mengakibatkan hilangnya perlindungan pantai dan perubahan arus pantai dan pola transportasi. Konsisten dengan peristiwa ini, wilayah pesisir juga berada di bawah tekanan yang kuat, dengan eskalasi kerusakan yang cukup signifikan di sepanjang pantai. Secara tidak langsung mengancam fungsi wilayah pesisir untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, sebagai sumber daya yang potensial, wilayah pesisir juga sangat rentan terhadap ancaman bencana alam dan dampak perubahan iklim.

Berdasarkan hasil kajian terdampak bencana gelombang tinggi dan abrasi yang disusun oleh BPBD pada tahun 2020, terlihat bahwa jumlah kepala keluarga yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud hampir mencapai 100 kepala keluarga dari 94.521 jiwa. Hal ini menjadi perhatian khusus yang dapat dicegah oleh pemerintah daerah, karena sebagian besar desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Talaud bermukim di pesisir pantai.

Secara geografis, bahaya yang sering terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah abrasi. Abrasi sendiri merupakan salah satu bahaya yang mengancam kondisi pantai, menyebabkan sedimen

memburuk dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Abrasi didefinisikan sebagai surutnya garis pantai dari posisi semula.

Abrasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, seperti naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global, cuaca ekstrim yang menyebabkan ombak besar dan kerusakan mangrove. Selain faktor alam, ada juga tindakan seperti pengambilan pasir dan batu secara ilegal, yang menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir. Abrasi tersebut semakin diperparah dengan 11 rumah warga di sepanjang bibir pantai Desa Rusoh akibat pasang dan gelombang tinggi (*Kumparan.Com*, n.d.). Selain itu, kurangnya pengawasan pemerintah yang ketat menyebabkan penebangan liar hutan mangrove di Desa Beo Barat oleh adik dari mantan pegawai pemerintah Kepulauan Talaud (*Bencanaupdate*, n.d.). Adapun masyarakat yang tinggal di pesisir pantai tepatnya Desa Dapihe, Kecamatan Tampan'Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud saat ini dilanda kecemasan. Pasalnya, akibat abrasi pantai yang terjadi beberapa tahun terakhir, saat ini sudah semakin dekat dengan pemukiman warga. Dalam kejadian ini sudah sempat ada pemantauan dari BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud, namun sampai sekarang belum ada tindakan yang dilakukan (*Komentarnews.Com*, n.d.).

Dari fakta di atas terlihat bahwa penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Talaud belum efektif dan efisien. Tentunya hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya harus berfungsi secara optimal sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengurangan risiko bencana.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan efektivitas kinerja BPBD dalam penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud. Faktor keterbatasan anggaran merupakan salah satunya. Penanggulangan abrasi pantai membutuhkan anggaran yang sangat besar dibandingkan dengan penanggulangan bencana lainnya. Hal ini sejalan dengan anggaran BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud pada Rekapitulasi Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Akibat Cuaca Ekstrim Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021 mencapai Rp.62 Milyar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penanggulangan abrasi dibutuhkan anggaran dalam jumlah yang sangat besar sehingga BPBD mengalami kesulitan untuk memenuhi anggaran tersebut.

Keterbatasan sumber daya menjadi permasalahan berikutnya, dimana masih BPBD cenderung tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik karena kekurangan sumber daya baik dari segi sumber daya manusianya sampai pada infrastruktur BPBD dalam menanggulangi bencana khususnya abrasi pantai di pesisir Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi BPBD dalam melaksanakan penanggulangan abrasi yakni kurangnya pegawai yang dibarengi dengan sarana dan prasarana yang masih belum mendukung sehingga belum dapat dikatakan efektif.

Sejalan dengan keterbatasan yang dihadapi BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud, kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi salah satu permasalahan penting. Masyarakat yang tidak ingin direlokasi ke tempat yang aman dimana sedikit jauh dari area permukiman yang ramai menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah khususnya BPBD untuk mengatasi hal tersebut. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap bahaya bencana yang masih kurang bisa berdampak pada kerugian maupun keamanan dan ketentraman kehidupan mereka sendiri.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran, kinerja BPBD dalam menanggulangi abrasi maupun sampai pada upaya BPBD dalam mengatasi abrasi pantai. Penelitian yang dilakukan oleh Dermawan (2020), peran BPBD dalam menangani bahaya abrasi

belum efektif. Hal ini masih terlihat dalam penanganan kecelakaan abrasi jangka pendek. Faktor pendukungnya adalah kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, dan faktor penghambatnya adalah keterbatasan dana dan infrastruktur. Berdasarkan survei tersebut, peran BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menanggulangi abrasi air laut di desa Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susou tidak bersifat jangka panjang dan masih banyak kendala dalam penanganan bencana abrasi sehingga belum optimal (Imam, 2020). Penelitian Rahmat Hidayat (2014) berjudul “Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis Mengatasi Abrasi (Survei Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis 2010-2012)”, upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi abrasi sudah baik, namun masih tidak maksimal. Beberapa permasalahan yang diupayakan untuk mengatasi abrasi di Kabupaten Bengkalis antara lain lemahnya koordinasi pemerintah atau instansi dan kurang lancarnya kegiatan rehabilitasi di wilayah pesisir. Selain itu, upaya yang dilakukan belum maksimal karena pemerintah tidak fokus pada pencegahannya (Rahmat, 2014). Penelitian Desy Marlina (2020) “Kinerja Pemkot Padang dalam mengatasi bencana abrasi di kawasan pantai Praus Kota Padang” dapat dikatakan belum efektif karena masih terdapat beberapa masalah dan hambatan bagi pemerintah untuk menghadapi abrasi, sehingga kinerja penanggulangan bencana tidak ideal. Semua itu terlihat dari tujuan, faktor integrasi dan adaptasi yang dicapai oleh Pemerintah Kota Padang dalam merespon bencana abrasi (Desi, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Adelina Manulang dan Maesaro (2019). Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Semarang tidak efektif, ini terlihat dari ketidakpatuhan terhadap indikator efisiensi kontrol dan adanya halangan dalam pengelolaan bencana alam, termasuk karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, serta strategi dan metode manajemen. Hasil di lokasi menunjukkan bahwa tujuan BPBD tidak dicapai karena kekurangan ruang dan infrastruktur, sumber daya manusia dan potensi institusi yang tidak mencukupi (Soppeng, 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menilai pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Talaud melalui efektivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani masalah abrasi di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud sudah berjalan efektif atau belum, metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif. Selain itu, penilaian/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori Robbins (2006) yang menyatakan lima indikator untuk mengukur efektivitas kinerja, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas kinerja BPBD dalam penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis keadaan objek alamiah, dengan peneliti sebagai alat kunci, pemilihan sumber data yang terarah, triangulasi metode pengumpulan, analisis data induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pada pentingnya generalisasi menurut Sugiyono (2016).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data melalui observasi, penulis melihat apa yang diamati, dan jika penulis tidak segera memahami maknanya berdasarkan peristiwa di lokasi, subjek dapat membantu menjelaskan makna

dari sesuatu yang disepakati bersama antara penulis dan subjek. Observasi dapat berupa dokumen, foto-foto acara kantor, dan data pendukung lainnya untuk dianalisa. Dalam melakukan pengumpulan data melalui wawancara, penulis menggunakan wawancara yang sistematis dengan petunjuk-petunjuk untuk melakukan wawancara. Oleh karena itu, sebelum terjun ke lapangan, penulis menyiapkan petunjuk wawancara berupa pertanyaan tertulis tentang masalah yang akan diajukan. Sedangkan dalam melakukan pengumpulan data melalui dokumen, penulis berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen terkait penelitian yang diperoleh di lapangan.

Adapun analisisnya menggunakan teori efektivitas kinerja yang digagas oleh Robbins (2006) yang menyatakan lima indikator untuk mengukur efektivitas kinerja, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas kinerja BPBD dalam penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara menggunakan pendapat dari Robbins (2006) yang menyatakan lima indikator untuk mengukur efektivitas kinerja, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kualitas

Kualitas adalah salah satu faktor penting yang digunakan untuk mengukur baik buruknya kinerja suatu organisasi berdasarkan produk yang berkualitas. Ketika terjadi bencana alam tentunya berdampak pada masyarakat baik fisik maupun non fisik, oleh karena itu BPBD Kabupaten Talaud menuntut agar dilakukan upaya maksimal untuk menanggulangnya.

Sebagai organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud harus memiliki kualitas yang setinggi-tingginya dalam melakukan pengelolaan bahaya abrasi pantai. Ini adalah tolok ukur BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk efektivitas kinerja lembaga. Sebagai lembaga yang melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dalam rangka penanggulangan kerusakan pantai di Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud mengatakan “Sebagai lembaga publik, BPBD memiliki prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, akuntabilitas, transparansi, dan juga melayani segala sesuatu yang berkaitan dengan kebencanaan. Untuk penanganan abrasi pantai, BPBD juga memiliki strategi penanggulangannya sendiri, dengan membentuk rencana pengelolaan yang komprehensif dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengarah pada penanggulangan abrasi pantai yang cepat, akurat dan efektif serta terencana”. Berdasarkan wawancara tersebut, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud terlebih dahulu merencanakan kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan penanggulangan bencana khususnya pada penanganan abrasi pantai. Hal ini direncanakan, terintegrasi, terkoordinasi dan dilaksanakan secara komprehensif.

Kualitas kinerja organisasi diukur dengan kualitas kinerja organisasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam organisasi khususnya di BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud perlu adanya kompetensi dan keterampilan yang mapan untuk menjalankan tugas tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penerapan pengendalian abrasi di pesisir Kabupaten Kepulauan Talaud sangat diperlukan, seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam wawancara dengan penulis “Sejauh ini, pelaksanaan pengelolaan abrasi pantai telah melalui dua fase, fase darurat dan logistik serta fase pemulihan dan rekonstruksi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, selama fase pemulihan dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud, pelaksanaannya tidak

mencapai 100% karena kendala pendanaan BPBD”. Berdasarkan hasil wawancara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Talaud telah melakukan pekerjaan bertahap untuk mengatasi abrasi pantai sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Namun, kemajuan dalam mengatasi abrasi pantai terhambat oleh terbatasnya dana yang tersedia untuk BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Salah satu unsur organisasi berkualitas tentunya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas pula untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Sejalan dengan wawancara penulis dengan Sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud menyatakan “Saat ini BPBD Kepulauan Talaud masih sedikit kekurangan personel karena jumlah personel tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan di lapangan, membuat lingkungan sekitar ikut tergerus erosi pantai. Tentu saja hal ini mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kualitas kinerja BPBD itu sendiri”. Dari wawancara tersebut terlihat bahwa kualitas sumber daya personel BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud masih kurang optimal. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan penanggulangan yang memakan waktu cukup lama sehingga mempengaruhi kualitas kinerja dari BPBD sendiri.

Berdasarkan hasil observasi mengenai kualitas penanggulangan abrasi yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud penulis menyimpulkan sudah berjalan dengan baik dimana penanggulangan abrasi pantai memfokuskan pada penanganan melalui tahapan kedaruratan dan logistik serta tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada pelaksanaannya, ketersediaan anggaran dan jumlah sumber daya pegawai yang masih kurang menjadi faktor keterbatasan yang dimiliki BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan fungsinya.

3.2. Kuantitas

Kuantitas adalah kriteria organisasi untuk menentukan apakah kinerja yang dilakukan efektif. Besarnya organisasi dapat dikatakan efektif apabila program kegiatan tersebut diwujudkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tentu saja, penentuan apa yang harus dilakukan dengan penanggulangan bencana dilakukan melalui data tentang lokasi kejadian bencana. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sekretaris BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam wawancara dengan penulis “Untuk dapat mengetahui kejadian abrasi pantai di Kabupaten Kepulauan Talaud, awalnya BPBD mendapat laporan dari Kepala Desa maupun masyarakat. Kemudian kami langsung melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk bersama melihat secara langsung dilapangan lokasi terdampak. Dari lokasi terdampak tentunya BPBD dapat menyusun rencana penanggulangan yang harus dilakukan”. Berdasarkan wawancara tersebut, BPBD memperoleh data kejadian abrasi pantai melalui laporan dari pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa dan masyarakat. Namun untuk melihat seberapa besar dampak dari suatu bencana, BPBD akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyusun rencana pengelolaan yang dapat dilaksanakan secara mendesak atau permanen.

Kinerja yang efektif tentunya dilihat dari seberapa jauh tercapainya tujuan dari organisasi itu sendiri. BPBD dituntut harus memberikan pelayanan prima sehingga meminimalisir adanya ketidakterlaksananya salah satu program. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bagian Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam wawancaranya dengan penulis mengatakan bahwa “Sampai saat ini, data kejadian abrasi pantai yang diperoleh BPBD sebanyak 10 Desa/Kelurahan terdampak. Dari Desa/Kelurahan tersebut seluruhnya telah tertangani secara darurat baik melalui BPBD sendiri dengan pembuatan tembok penahan gelombang laut terbuat dari karung yang diisi pasir dan batang pohon kelapa untuk mengurangi terjadinya pelebaran abrasi pantai maupun lewat koordinasi dengan pihak Kecamatan dengan pelaksanaan kerja bakti bersama. Selain itu, kami juga telah mendistribusikan bantuan logistik di tiap-tiap lokasi terdampak”. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dari 10 desa/Kelurahan yang terkena dampak abrasi pantai, semuanya sudah ditangani secara darurat oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan pembuatan tembok

penahan gelombang laut dari karung berisi pasir atau batang pohon kelapa. Disamping itu distribusi bantuan logistik sudah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi penulis mengenai kuantitas, pelaksanaan penanggulangan abrasi di pesisir pantai oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud sudah terlaksana secara keseluruhan di setiap Desa/Kelurahan dengan menggunakan karung berisi pasir dan batang kelapa pada situasi darurat serta penyaluran bantuan melalui unit darurat dan logistik serta melalui logistik permanen dinilai sudah baik. Meskipun ada beberapa rintangan, BPBD mampu mengelola penanggulangan abrasi pantai dengan cepat dan akurat.

3.3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu (*timeless*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan informasi yang up-to-date. Informasi memiliki manfaat ketika tersedia bagi pengguna pada waktu yang tepat untuk membuat keputusan. Sedangkan menurut Robbins (2006), ketepatan waktu adalah tingkat kegiatan yang berakhir pada awal waktu, dapat dipertimbangkan dalam hal mengkoordinasikan keluaran dan memaksimalkan waktu untuk kegiatan lain. Hal ini menjadi syarat bagi BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dapat memberikan hasil kinerja penanggulangan abrasi pantai yang maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama pegawai Tim Reaksi Cepat (TRC) dan juga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik bahwa “Terobosan yang dimiliki BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam meminimalisir penggunaan waktu terhadap penanggulangan abrasi pantai ialah membentuk jaringan komunikasi dengan pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa yang mana jika BPBD mengalami kendala akses masuk ke lokasi secara langsung, proses penanggulangan abrasi masih dapat dilaksanakan lewat pihak Kecamatan sehingga tidak buang-buang waktu”. Dari hasil wawancara tersebut BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki sebuah terobosan dalam menggunakan waktu pada pelaksanaan penanggulangan abrasi dengan cara pembentukan jaringan komunikasi bersama dengan pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa. Hal ini tentu dilakukan jika proses penanggulangan abrasi pantai mengalami kendala, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud dapat berkoordinasi dengan pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa agar dengan sigap melaksanakan aksi tanggap darurat untuk menghambat proses abrasi.

Efisiensi waktu adalah cara atau kemampuan menggunakan waktu paling sedikit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mengatasi abrasi pantai tentu bukan hal yang bisa dianggap enteng. Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud menyatakan bahwa “Saat mendapat laporan dari Kepala Desa maupun masyarakat mengenai kejadian bencana, saat itu juga BPBD langsung melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta bersama-sama turun langsung meninjau ke lokasi terdampak sehingga segera dapat menyusun rencana program penanggulangannya”. Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka melaksanakan tugasnya tidak menganggap remeh waktu yang ada.

Berdasarkan observasi terkait ketepatan waktu dalam proses penanggulangan abrasi pantai, penulis menyimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki terobosan dalam menghasilkan penanggulangan abrasi pantai yang maksimal yaitu dengan membentuk jaringan komunikasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan lembaga-lembaga terkait seperti pihak Kecamatan/Desa/Kelurahan guna mengoptimalkan penggunaan waktu dan juga memperlambat proses abrasi pantai.

3.4. Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dan usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan tersebut. Apabila tujuan yang dimaksud

merupakan tujuan suatu lembaga, maka proses pencapaian tujuan tersebut berhasil dalam melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, kewajiban, dan fungsi lembaga tersebut. Menurut Robbins (2006), efektivitas adalah tentang memaksimalkan penggunaan sumber daya organisasi (sumber daya manusia, dana, teknologi, bahan baku) dengan tujuan meningkatkan hasil setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

Pelaksanaan penanggulangan abrasi di pesisir Kabupaten Kepulauan Talaud mengacu pada ketersediaan anggaran yang dihimpun dari APBD Kabupaten Kepulauan Talaud. Alokasi anggaran harus digunakan secara serius, mulai dari langkah-langkah, peningkatan kapasitas, dan kualitas layanan, dari keterampilan peralatan hingga ketersediaan peralatan dan infrastruktur yang memadai untuk menerapkan langkah-langkah yang efektif. Wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud menyatakan bahwa “ruksi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Talaud :

Mengatasi abrasi pantai di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah masalah serius dalam program BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud. Mengenai tindakan-tindakan yang harus diambil oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, ada anggaran untuk pelaksanaan semua program yang direncanakan untuk mencegah abrasinya pantai. Kapital atau anggaran adalah dasar untuk pelaksanaan kebijakan, karena jika ada anggaran, semua dana yang diperlukan seperti mobil, saluran komunikasi, perangkat keamanan, dan lain-lain dibeli sesuai dengan ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk studi mendalam dan analisis yang menyeluruh dalam pembentukan program sehingga dapat dikaitkan dengan kehadiran dana yang berasal dari anggaran daerah”. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan abrasi di pesisir Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pelaksanaan program yang telah dibentuk perlu dikaitkan dengan ketersediaan anggaran dari APBD Kabupaten Kepulauan Talaud. Ketersediaan modal menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus pelaksanaan pencegahan erosi pantai. Dalam mengatasi pengeroposan sumber daya khususnya sarana dan prasarana, perlu dirumuskan alokasi dana yang diterima dari Pemerintah Kepulauan Talaud untuk menyediakan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien sehingga dana yang ada tidak terpenuhi dan hanya disia-siakan untuk hal lain yang kurang bermanfaat.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait efektivitas penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud, BPBD telah memaksimalkan program penanggulangan abrasi dengan memanfaatkan potensi sumber dayanya yaitu koordinasi bersama pihak ketiga guna memenuhi kebutuhan yang mendukung dalam proses penanggulangan abrasi sehingga terlaksana dengan baik dan lancar secara menyeluruh.

3.5. Kemandirian

Kemandirian (*self reliance*) adalah kemampuan untuk berjalan dan berpikir secara mandiri, serta kemampuan untuk mengelola semua yang dimiliki dan mengatur waktu, mengambil risiko dan memecahkan masalah. Dalam melaksanakan penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki strategi melaksanakan penanggulangan abrasi secara mandiri yaitu dengan cara inisiatif terbaru dalam menjaga kelestarian ekosistem pantai seperti yang dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam wawancara bersama penulis bahwa “Kami memiliki strategi tersendiri sesuai dengan kondisi lingkungan pesisir Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melakukan penanggulangan abrasi pantai ini, salah satunya adalah dengan melakukan inisiatif tersendiri dari kami yakni menjaga kelestarian ekosistem pantai”. Berdasarkan wawancara tersebut, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki strategi tersendiri dalam melakukan penanggulangan abrasi pantai yaitu dengan melakukan inisiatif strategi sesuai dengan kondisi lingkungan di pesisir Kabupaten Kepulauan Talaud seperti menjaga kelestarian ekosistem pantai.

Melihat potensi-potensi yang dimiliki kawasan pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Talaud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan penanggulangan abrasi bisa dilakukan tanpa mengganggu kelestarian ekosistem pantai, melainkan menambah kelestarian ekosistem pantai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud juga dengan dua pegawai lainnya mengatakan bahwa “BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki cara tersendiri dalam melakukan penanggulangan abrasi pantai tanpa merusak kelestarian ekosistem pantai malah menambah kelestarian ekosistem pantai di Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu dengan melakukan penanaman pohon bakau di daerah-daerah pesisir yang memiliki potensi besar terkena abrasi pantai. Diharapkan dengan melakukan penanaman pohon ini bersama dengan warga juga kedepannya akan membuat hutan bakau kabupaten ini sebagai penanggulangan abrasi secara alami dengan menambah kapasitas pohon-pohon bakau yang ada di pesisir menjadi menambah”. Dari wawancara tersebut, diartikan bahwa BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki inisiatif sendiri dengan memanfaatkan ekosistem pantai untuk menanggulangi potensi kerawanan daerah pesisir dengan cara penanaman pohon bakau pada titik-titik potensi rawan terkena abrasi pantai yang diharapkan kedepannya menjadi hutan bakau sebagai penanggulangan abrasi secara natural oleh pohon-pohon bakau yang ada di pesisir pantai. Berdasarkan hasil observasi penulis mengenai kemandirian, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki inisiatif lembaga yang sangat baik dengan menggunakan kondisi lingkungan sebagai strategi dalam penanggulangan abrasi secara alami tanpa merusak kelestarian lingkungan yang ada di kawasan pesisir Kabupaten Kepulauan Talaud.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penanggulangan bencana secara efektif tentunya memberikan dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka mencapai rasa aman dan tentram dalam menjalani kehidupan. Pelaksanaan penanggulangan abrasi dari BPBD di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu tolok ukur penilaian efektivitas kinerja dari BPBD sendiri yang memiliki tugas dan tanggung jawab pada bidang kebencanaan.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat efektivitas kinerja BPBD dalam penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ini yakni ketersediaan sumber daya pegawai kurang memadai, kondisi iklim yang tidak menentu memperhambat penanggulangan abrasi, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas kinerja BPBD dalam menanggulangi abrasi di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud telah berjalan dengan baik sehingga kinerja BPBD dinilai cukup efektif. hal ini terlihat dari adanya tercapainya program-program penanggulangan abrasi dengan membentuk jaringan komunikasi dari BPBD dengan pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa maupun dengan masyarakatnya. Adapun strategi dengan memanfaatkan potensi sumber daya seadanya yang tidak merusak, melainkan melestarikannya ekosistem pantai itu sendiri. Guna meningkatkan efektivitas kinerja BPBD dalam menanggulangi abrasi, disarankan untuk memperbaharui sarana dan prasarannya baik dari infrastruksur maupun personel, serta selalu menegakkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana. BPBD juga diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan kualitasnya dalam menanggulangi bencana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Talaud beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Creswell, John. W. 2016. *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi keempat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neuman, W. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Assex: Pearson Education Limited.
- Steers, M. Richard . 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokusmedia.
- Robbins, S. P. (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Indeks, Kelompok Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Provinsi Sulawesi Utara.
- 11 Rumah di Talaud, Sulut, Terdampak Abrasi | kumparan.com.* (n.d.).
- Desi, M. (2020). *Efektivitas Kinerja Pemerintah Kota Padang Dalam Menanggulangi Bencana Abrasi Sepanjang Kawasan Purus Di Kota Padang.*
- Imam, D. (2020). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh.* <https://library.ar-raniry.ac.id/>
- Kerusakan Hutan Mangrove di Kab. Talaud Picu Bencana Abrasi | bencanaupdate.* (n.d.).
- Noor, J. (2015). *Analisis Data Penelitian.* 31–40.
- Rahmat, H. (2014). *Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Abrasi.* 1, 1–16.
- Ratnasari, S. L. dan Y. H. (2019). Sistem Penghargaan Dan Kompensasi. In N. D. dan A. E. Anggraeni (Ed.), *Manajemen Kinerja Dalam Organisasi* (pp. 77–82). Qiara Media.
- Rofifah, D. (2020). *Metode Penelitian.* 12–26.

Rusyandi, D., & Rachmawati, R. (2017). Evaluasi Penilaian Kinerja dengan Menggunakan Metode SMART dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Kerja. *ISEI Business and Management Review*, I(2), 79–87.

Sari, D. A. (2017). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Di Kabupaten Sampang (Studi Kasus di BPBD Kabupaten Sampang)*.

Siagian, T. F. L. & H. (2018). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja pada CV. Union Event Planner. *Agora*, 6(1).

Soppeng, E. K. P. P. B. D. (BPBD) D. K. L. K. (2020). *Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pra Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng*. 3(2017), 54–67.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. 56–67.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud. 2020. Kepulauan Talaud dalam Angka 2020. Talaud: BPS Kabupaten Kepulauan Talaud.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud. 2021. Kepulauan Talaud dalam Angka 2021. Talaud: BPS Kabupaten Kepulauan Talaud.

